

LAKIP TAHUN ANGGARAN 2023



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MAMUJU
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 dan tahun lapor 2024 dapat diselesaikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran 2023 dan didalamnya disajikan data dan informasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju yang dibiayai dari APBD Tahun 2023 sebagaimana terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dengan berpedoman pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju .

Selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 ini, diharapkan dapat menunjukkan eksistensinya selaku dokumen pertanggung jawaban dan sumber informasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, serta menjadi bahan acuan untuk tahun mendatang.

Mamuju, 31 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KAB.MAMUJU



Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19651231 1993 1 181

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju merupakan penugasan dari Bupati Mamuju untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, dapat diukur tugas dan fungsi sekretariat DPRD.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 diselaraskan dengan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan kembali melalui sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu, yang menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda kegiatan DPRD, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara keseluruhan capaian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun mempunyai masih dalam skala penilaian bermakna Sangat baik, yaitu capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan, pencapaian ini diperoleh dari pelaksanaan sebanyak 2 indikator kinerja dari 2 sasaran. Di tahun anggaran selanjutnya untuk mencapai visi Sekretariat DPRD Kab. Mamuju harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp. 34.257.542.776 dan telah terealisasi sebesar Rp. 33.494.411.045, dengan rincian adalah pengeluaran SPJ Rp.34.257.542.776, Pajak penghasilan Ps 22 sebesar Rp. 45.490.259, Pajak penghasilan Ps 23 sebesar Rp.62.970.890, dan pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 348.574.005, atau dengan total serapan sekitar 97,59%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju kondisi anggaran silpa Rp.763.131.731,-.

BAB I

PENDAHULUAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju sebagai salah satu perangkat daerah pemerintah Kabupaten Mamuju yang mempunyai tugas sebagai fasilitator kegiatan DPRD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. Rencana strategis ini berdasarkan kepada visi dan misi Kabupaten Mamuju serta visi dan misi Sekretariat DPRD, kemudian dituangkan kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan.

Telah disahkannya Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap satuan kerja diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat LKIP.

LKIP adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja. Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju, sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada dibawah Pemerintahan Kabupaten Mamuju berkewajiban pula untuk menyusun laporan tersebut.

1.1 Gambaran Umum OPD

Peraturan Daerah Kota Mamuju Nomor. 08 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju. Sekretariat DPRD Kab. Mamuju di Pimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang membawahi :

1. Kabag Keuangan;
2. Kabag Persidangan;
3. Kabag Umum Perlengkapan

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kab. Mamuju, bahwa telah ditetapkan tugas, fungsi dan uraian tugas yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kab Mamuju, sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat, dan pengkoordinasian dan penyediaan tenaga ahli DPRD;

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja Sekretariat DPRD;
- b. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha umum;
- c. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha persidangan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan kehumasan;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan pegawai;
- g. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan tenaga ahli guna membantu kelancaran kegiatan DPRD;
- h. Pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sama dengan unsur mitra kerja DPRD;
- i. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. Pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bagian umum dan Perlengkapan

Bagian umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan, perencanaan, dan pengawasan, penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;

Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari 3 sub bagian , yaitu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan ketatausahaan dan menyelenggarakan administrasi ketatausahaan.
- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas pokok koordinasi dan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi perlengkapan dan rumah tangga DPRD;
- c. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas pokok mengelola administrasi kepangkatan, gaji, pensiun, mutasi, promosi jabatan, lingkup Sekretariat DPRD;

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan operasional serta menyelenggarakan pengelolaan dan administrasi keuangan lingkup Sekretariat DPRD. Bagian keuangan terdiri dari 3 sub bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran Sekretariat DPRD dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pencatatan, pembukuan dan inventarisasi penerimaan dan pengeluaran keuangan Lingkup Sekretariat DPRD;

- c. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap Realisasi Anggaran dan Pertanggungjawaban Belanja Administrasi Umum dan Operasional di Lingkup Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan keuangan Sekretariat DPRD;
4. Bagian Persidangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan rapat/persidangan, penyusunan risalah/kesimpulan rapat, pengkajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan, memfasilitasi alat kelengkapan, kepanitiaan, fraksi-fraksi, serta penyusunan rencana reses, kehumasan dan keprotokoleran DPRD. Bagian Persidangan terdiri dari 3 sub bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pokok penyusunan rencana, bahan, data, informasi dan administrasi rencana kegiatan rapat dan risalah rapat DPRD;
- b. Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang - perundangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana kerja, menganalisa, mengkaji, dan menghimpun produk-produk hukum;
- c. Sub Bagian Kehumasan dan Keprotokoleran mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan, mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi program kehumasan, publikasi dan keprotokoleran DPRD.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan OPD

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Rencana Strategis periode 2021-2026 adalah :

- Meningkatkan pelayanan bagi peningkatan kapasitas kinerja DPRD Kab. Mamuju
Dengan indikator tujuan adalah Persentase Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Mamuju terhadap tugas pokok dan fungsi Dewan

1.2.2 Sasaran OPD

1. Peningkatan pelayanan yang prima dan optimal bagi pimpinan dan anggota DPRD serta hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif.

Indikatornya adalah Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Mamuju

2. Peningkatan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah.

Indikatornya adalah :

- a. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
 - b. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Indikatornya adalah Nilai Sakip, Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah, persentase ASN dengan nilai SKP kategori Baik

1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

1.3.1 Strategi

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang dimaksud merupakan pemilihan dan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mengimplementasikan perencanaan strategi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun rencana strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi dan sasaran Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan Lembaga Pemerintah Daerah.
2. Optimalisasi pelaksanaan fungsi DPRD
3. Optimalisasi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD

1.3.2 Arah dan Kebijakan OPD

Arah Kebijakan Umum Sekretariat DPRD kabupaten Mamuju adalah :

1. Meningkatnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan perangkatnya.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang lebih baik.
3. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan disiplin aparatur dan penyusunan laporan kinerja dan keuangan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa:

- a. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan DPRD Kabupaten Mamuju yang mendukung program pembangunan pemerintah.
- b. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa sesuai kebutuhan anggota DPRD Kabupaten Mamuju.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran maka perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan untuk memberikan petunjuk, arahan, prinsip dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Arah kebijakan umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju adalah :

- a. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan administrasi pada lingkungan Sekretariat DPRD.
- b. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang DPRD dan Sekretariat DPRD.
- c. Peningkatan sumberdaya profesionalisme serta disiplin aparat Sekretariat DPRD.
- d. Ketersediaan sarana pelayanan, kebersihan dan keamanan yg kondusif.
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan DPRD.

Isu-isu Strategis dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD :

1. Perlunya peningkatan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, serta meningkatkan fungsi kepastakaan dan kearsipan DPRD
2. Perlunya peningkatan kualitas dan efektivitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitas kegiatan alat kelengkapan dewan
3. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan dan kompetensi SDM penyelenggara urusan rumah tangga dan kehumasan serta keprotokoleran
4. Perlunya standar pelayanan penyusunan program, evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja menampilkan Target dan indikator sasaran kinerja sesuai dengan IKU yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pengukuran kinerja yang termuat didalam Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

A. Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tahun 2024 perencanaan kinerja dapat terlihat pada Perjanjian Kinerja pada level eselon II untuk sasaran program di setwan, eselon III untuk sasaran program yang dilaksanakan dan eselon IV untuk sasaran kegiatan yang dilaksanakan. (Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Mamuju 2024 terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum dapat dikatakan bahwa program yg telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2024 dapat dicapai oleh sekretariat DPRD kabupaten mamuju. Dari program telah tercapai dengan kategori capaian sangat baik sebanyak 2 (dua) program yang merupakan keseluruhan dari program yang dilaksanakan setwan.

Cara perhitungan tingkat capaian sasaran diatas adalah dengan menggunakan perbandingan sederhana antara target dengan realisasi dalam tahun yang bersangkutan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi suatu indikator yang mempengaruhi suatu sasaran. Untuk perhitungan saat ini bobot yang di berikan sama besar adalah yang berarti diasumsikannya bahwa setiap indikator sasaran dari suatu sasaran memiliki pengaruh yang sama terhadap sasaran yang bersangkutan.
2. Memperbandingkan antara tingkat capaian indikator sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
3. Menghitung setiap tingkat capaian sasaran dengan analisis kausal tingkat capaian indikator masing-masing sasaran.
4. Analisis seluruh tingkat capaian masing-masing sasaran sehingga dapat dihitung capaian kinerja keseluruhan dengan menganalisis faktor-faktor substansi yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja.

Hasil pencapaian kinerja program ini menunjukkan bahwa sekretariat DPRD kabupaten mamuju dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Satu hal yang perlu di perhatikan bahwa pencapaian suatu kinerja merupakan gabungan dari kegiatan yang dilakukan beberapa bidang untuk mewujudkan satu atau lebih indikator. tinggi rendahnya suatu capaian tidaklah terlalu mencerminkan gambaran sesungguhnya dari kinerja tetapi harus dilihat bagaimana pencapaian target yang ditetapkan apakah kurang sama atau melebihi target.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Sekretariat DPRD Kab.Mamuju dapat diukur dengan target indikator yang telah tertuang pada cascading setwan merujuk pada **Keppmendagri 050-5889 Ta. 2022** tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat DPRD memiliki 2 sasaran dan 3 indikator, dan dari Renstra Sekretariat juga memiliki 1 sasaran dan 1 indikator yang disesuaikan dengan VISI dan MISI RPJMD.

Pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Nilai Akip setwan, Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah; hal memuat kegiatan rutin dalam OPD nampak tidak dapat mencapai 100% baik pada 2022 maupun 2023. Ini disebabkan oleh efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam penggunaan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut, meskipun didalam renstra telah ditargetkan 100% dengan 19 kegiatan layanan administrasi yang direncanakan untuk 2024. Formulasi yang digunakan untuk pengukuran inidikator ini adalah melalui penilaian pelayanan Sekretariat DPRD untuk Dewan

No	Indikator Sasaran	TAHUN 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Nilai akip	CC		
2	Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Baik	Baik	Baik

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi dana untuk membiayai kegiatan sekretariat DPRD kabupaten mamuju tahun anggaran 2022 untuk program dan kegiatan tersedia anggaran sebesar Rp. 40.215.206.860 dan telah terealisasi sebesar Rp. 38.062.250.435, atau dapat dihitung menjadi total serapan sekitar 94,64%. Sedangkan pada 2023 untuk program dan kegiatan tersedia anggaran sebesar Rp. 34.257.542.776 dan telah terealisasi sebesar Rp. 33.494.411.045, atau dengan total serapan sekitar 97,59%.

Sesuai dengan target kinerja tahun 2023 sebagaimana yg dikemukakan mencakup pelaksanaan 2 program untuk mendukung misi, 4 yang termuat didalam RPJMD. Berdasarkan pengukuran kinerja semua program yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal. Rata – rata tingkat kinerja program selama tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023 rata – rata tingkat capaian kinerja dari program ini sebesar 100%, dengan serapan dana 97,59%. Tingkat capaian keberhasilan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator yaitu Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemda dan Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pada Tahun 2023, rata – rata tingkat capaian kinerja dari program ini sebesar 100%, dengan serapan dana 97,59%. Tingkat capaian keberhasilan sasaran ini diukur menggunakan indikator yaitu Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

No	URUSAN / OPD / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN	REALISASI			KET.
					FISIK (%)	KEUANGAN	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH								
SEKRETARIAT DPRD KAB. MAMUJU								
	SEKRETARIAT DPRD			34.257.542.776	100%	33.494.411.045	97,59%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemda	Baik	25.603.186.475	baik	24.893.181.427	97,22%	
	Perencanaan penganggaran evaluasi dan kinerja perangkat daerah	Persentase Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	80.171.840	100%	78.247.120	98,59%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	100%	4.108.232.540.	100%	4.055.804.239	98,72%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	85.700.200	100%	85.699.400	99,99%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	100%	419.562.680	100%	390.901.333	93,16%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	100%	2.125.997.353	100%	2.124.755.700	99,94%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	36.620.000	100%	36.620.000	100%	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	623.832.766	100%	614.374.331	98,48%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	363.094.632	100%	269.986.000	74,35%	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Hasil Penilaian DPRD terhadap layanan keuangan dan Kesejahteraan	100%	14.323.615.064	100%	13.970.484.004	97,53%	
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Hasil Penilaian DPRD terhadap layanan administrasi	100%	3.436.359.400	100%	3.266.309.300	99,05%	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	Baik	8.654.356.301	baik	8.601.229.618	99,38%	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Jumlah Perda yang ditetapkan	100%	1.532.161.680	100%	1.523.877.583	99,45%	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Jumlah laporan yang disusun	100%	19.459.800	100%	19.459.800	100%	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Jumlah laporan yang disusun	100%	752.080	100%	752.080	100%	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Jumlah Jenis Bimtek terlaksana	100%	1.433.167.836	100%	1.390.218.837	97,00%	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah dokumen Aspirasi Masyarakat	100%	3.505.536.810	100%	3.504.049.640	99,95%	

	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Jumlah laporan kode etik DPRD yang diselesaikan	%		%		%	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	2.163.278.095	100%	2.162.871.678	99,99%	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Anggaran dan realisasi dana untuk membiayai kegiatan sekretariat DPRD kabupaten mamuju tahun anggaran 2023 untuk program dan kegiatan tersedia anggaran sebesar Rp. 34.257.542.776 dan telah terealisasi sebesar Rp. 33.494.411.045, atau dapat dihitung menjadi total serapan sekitar 90,49%.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2023, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecah masalah yang akan dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kerja Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Lebih proaktif menjalin kerjasama dengan OPD terkait, terutama instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Perencanaan disusun lebih realistis sesuai dengan sumber daya yang tersedia
3. Melakukan evaluasi kegiatan secara periodik apabila hasil kegiatan kurang optimal
4. Kegiatan monitoring yang telah ditentukan, selayaknya dioperasionalkan secara teliti
5. Perencanaan dan target kinerja Sekretariat DPRD Kab. Mamuju harus secara terus menerus disosialisasikan kepada seluruh jajaran ASN dari berbagai

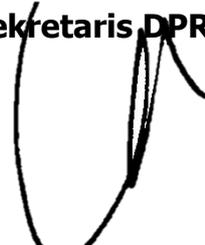
tingkat struktural, sehingga komitmen untuk mencapai sasaran dapat terwujud sesuai visi yang telah ditetapkan

6. Lebih meningkatkan kapasitas aparatur.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Mamuju.

Mamuju, 31 Januari 2024

Sekretaris DPRD,



Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19651231 1993 1 181

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM**
Jabatan : **SEKRETARIS DPRD**

Selanjutnya disebut pihak pertama

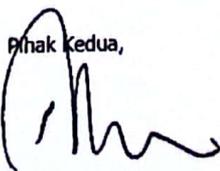
Nama : **HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI, M.Si**
Jabatan : **BUPATI MAMUJU**
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,


HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI, M.Si

Pihak Pertama,


Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM

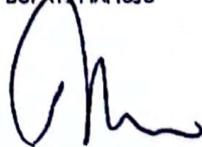
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terlaksananya dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Baik
	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan	Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi	Baik

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	Pprogram Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp 8,501,225,376	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 24,561,368,192	
		Rp 33,062,593,568	

Mamuju, 31 Januari 2024

BUPATI MAMUJU



HJ. SITI SUTINAH SUHARDI

SEKRETARIS DEWAN



Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **IBRAHIM, SH**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM**
Jabatan : **SEKRETARIS DEWAN**
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,


Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM

Pihak Pertama,


IBRAHIM, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN KEUANGAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Presentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%
	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	Meningkatnya Perencanaan penganggaran evaluasi dan kinerja perangkat daerah	Presentase Perencanaan penganggaran evaluasi dan kinerja perangkat daerah	100%

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13,849,219,395	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,530,241,915	
	Perencanaan penganggaran evaluasi dan kinerja perangkat daerah	29,211,500	
		Rp 18,408,672,810	

SEKRETARIS DEWAN



Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM

Mamuju, 31 Januari 2024

KABAG KEUANGAN



IBRAHIM, SH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASNANI,SE,M.M**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IBRAHIM, SH**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

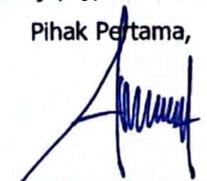
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,


IBRAHIM, SH

Pihak Pertama,


ASNANI,SE,M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN KEUANGAN
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Pokok dan Perubahan yang disusun	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang disusun	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- Perubahan SKPD yang disusun	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang disusun	4 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA- Perubahan SKPD yang disusun	1 Dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja SKPD	4 Dokumen

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,894,300	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,061,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,971,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,813,900	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,997,900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,520,300	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,953,100	
		Rp 29,211,500	

Mamuju, 31 Januari 2024

KABAG KEUANGAN


IBRAHIM, SH

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN


ASNANI, SE. M.M

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PEMBUKUAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PUSPAWATI, SE,M.M**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PEMBUKUAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IBRAHIM, SH**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


IBRAHIM, SH

Mamuju, 31 Januari 2024

Pihak Pertama,


PUSPAWATI, SE,M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN KEUANGAN
KEPALA SUB BAGIAN PEMBUKUAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terselenggaranya Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah laporan adminstasi keuangan dewan terselenggara	1 Dokumen
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangan	58 Orang
	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Setwan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4,835,640	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,380,410,052	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6,032,600	
		Rp 4,391,278,292	

Mamuju, 31 Januari 2024

KABAG KEUANGAN


IBRAHIM, SH

KASUBAG PEMBUKUAN


PUSPAWATI, SE .MM

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAPORAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MASDAWATY, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAPORAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IBRAHIM, SH**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


IBRAHIM, SH

Mamuju, 31 Januari 2024

Pihak Pertama,


MASDAWATY, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN KEUANGAN
KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAPORAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
	Tersedianya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	1 Dokumen
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TriwulananSemesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Dokumen

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140,004,403	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 9,100,320.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 5,001,540.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TriwulananSemesteran SKPD	4,857,360	DAU
		Rp 158,963,623	

Mamuju, 31 Januari 2024

KABAG KEUANGAN

KASUBAG VERIFIKASI DAN PELAPORAN


IBRAMIM, SH


MASDAWATY, SE

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **BUDIAWAN, SE,MM**
Jabatan : **KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM**
Jabatan : **SEKRETARIS DEWAN**
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,

Handwritten signature of Drs. H. Muhammad Syahrir, MM in blue ink.

Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM

Pihak Pertama,

Handwritten signature of Budiawan, SE, MM in blue ink.

BUDIAWAN, SE,MM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Jumlah dokumen Aspirasi Masyarakat	100%
2	Meningkatnya Layanan Administrasi DPRD	Persentase Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitas Tuas DPRD	100%
3	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Barang Milik Daerah	100%
4	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	100%
5	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum	100%
6	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
7	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	100%
8	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 285,000,000	
	Layanan Administrasi DPRD	Rp 2,722,715,600	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 26,842,200	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 185,357,600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,545,965,900	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 89,434,600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 869,058,560	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 428,320,922	
	JUMLAH	6,152,695,382	

SEKRETARIS DEWAN

Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM

Mamuju, 31 Januari 2024

KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN

BUDIWAN, SE, MM

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI ILYAS, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA**

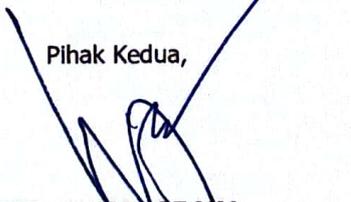
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDIAWAN, SE,MM**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BUDIAWAN, SE,MM

Mamuju, 31 Januari 2024
Pihak Pertama,

ANDI ILYAS, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	1 Dokumen
	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	1 Laporan
	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah BMD DPRD yang diamankan	1 Laporan
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan
	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Asset SKPD	1 Dokumen
	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut yan diadakan	2 Paket
	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang Tersedia	12 Paket
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	6 Paket
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	2 Paket
	Tersedianya Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas	Jumlah Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas	13 Paket
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Pertauran Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 Dokumen
	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	2 Unit
	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang Mendapatkan Fasilitas Layanan	18333 Laporan
	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 Unit
	Terlaksananya Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Meubel	1 Unit
	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Diadakan	5 Unit
	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,431,900	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4,000,000	
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	2,943,800	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,910,200	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,556,300	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,864,800	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,900,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,998,000	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas	405,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pertauran Perundang-Undangan	14,850,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53,794,624	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	648,788,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	25,152,000	
	Pengadaan Meubel	8,704,600	
	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	7,500,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48,078,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	591,073,360	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109,050,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128,308,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	252,089,050	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39,100,000	

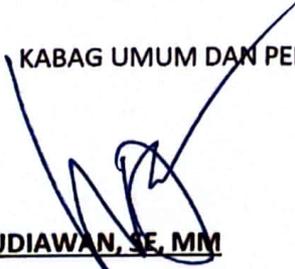
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan
Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan dan Perbaikan Peralatan Perlengkapan Kerja Kantor	8 Laporan
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	20 Laporan
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Dipelihara	1Unit
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	1 Paket
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD tersedia	3 Paket
Tersedianya Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi DPRD terfasilitasi	6 Paket
Tersedianya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD terfasilitasi	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Rumah Tangga DPRD Yang dipenuhi kebutuhannya	3 Paket

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,448,000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	6,339,872	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,360,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,984,000	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	285,000,000	
Fasilitas Fraksi DPRD	335,711,600	
Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	361,254,000	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2,025,750,000	
	Rp	5,546,940,506

Mamuju, 31 Januari 2024

KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN

KASUBAG PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA


BUDIAWAN, SE, MM


ANDI ILYAS, SE

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DARMAWATI RAHIM, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDIAWAN, SE,MM**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BUDIAWAN, SE,MM

Mamuju, 31 Januari 2024

Pihak Pertama,

DARMAWATI RAHIM, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

No (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
	Terlaksananya Monitoring ,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dan Laporan Monitoring ,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
	Terselenggaraya Bimtek PerUU	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Perundang-Undangan	14 Orang
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	180 Laporan

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Monitoring ,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,881,600	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	174,546,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	406,738,700	
		Rp 584,166,300	

KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN


BUDIAWAN, SE, MM

Mamuju, 31 Januari 2024

KASUBAG KEPEGAWAIAN


DARMAWATI RAHIM, SE

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN TATA USAHA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HJ. ULPA, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDIAWAN, SE,MM**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BUDIAWAN, SE,MM

Mamuju, 31 Januari 2024

Pihak Pertama,

HJ. ULPA, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	54 Paket
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis
	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat menyurat tersedia	12 bulan

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,758,400	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	16,068,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40,626,800	
		Rp 75,453,200	

Mamuju, 31 Januari 2024

KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN


BUDIAWAN, SE, MM

KASUBAG TATA USAHA


HJ. ULPA, SE

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **PAHARUDDIN, BA**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM**
Jabatan : **SEKRETARIS DEWAN**
Selaku atasan langsung pihak pertama

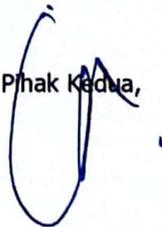
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,

A blue ink signature of Drs. H. Muhammad Syahrir, MM.

Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM

Pihak Pertama,

A blue ink signature of Paharuddin, BA.

PAHARUDDIN, BA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN PERSIDANGAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Jumlah Perda yang ditetapkan	100%
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Jumlah laporan yang disusun	100%
	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Jumlah laporan yang disusun	100%
	Meningkatnya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Jumlah Jenis Bimtek terlaksana dan tenaga ahli tersedia	100%
	Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah dokumen Aspirasi Masyarakat	100%
	Meningkatnya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Jumlah laporan kode etik DPRD yang diselesaikan	100%
	Meningkatnya Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD	100%

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	644,887,800	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp 25,000,000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	66,206,600	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 1,496,158,476	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp 4,129,731,300	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 3,601,600	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 2,135,639,800	
		Rp 8,501,225,576	

SEKRETARIS DEWAN



Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM

Mamuju, 31 Januari 2024

KABAG PERSIDANGAN



PAHARUDDIN, BA

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN PERSIDANGAN
SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MEDALI INTAN, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **PAHARUDDIN, BA**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,


PAHARUDDIN, BA

Pihak Pertama,


MEDALI INTAN, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN PERSIDANGAN
KEPALA SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terlaksananya Perbahasan KUA dan PPAS	Jumlah laporan hasil pembahasan KUA dan PPAS yang dibuat	1 Laporan Risalah Rapat
	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah laporan hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibuat	1 Laporan Risalah Rapat
	Terselenggaranya Pembahasan APBD	Jumlah laporan hasil Pembahasan APBD yang dibuat	1 Laporan Risalah Rapat
	Terselenggaranya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah laporan hasil pembahasan KUA dan PPAS yang dibuat	1 Laporan Risalah Rapat
	Terselenggaranya pelaksanaan Reses	Jumlah laporan reses terlaksana	3 Laporan
	Terlaksanya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	Jumlah Pembahasan Laporan	1 Laporan
	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitas Bamus	1 Laporan
	Terselenggaranya Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Program Kerja DPRD	1 Dokumen
	Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok pikiran DPRD	Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Dokumen

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Pembahasan KUA dan PPAS	5,000,000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5,000,000	
	Pembahasan APBD	5,000,000	
	Pembahasan APBD Perubahan	5,000,000	
	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	5,000,000	
	Pelaksanaan Reses	3,672,312,000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	20,816,600	
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8,226,500	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	3,997,900	
	Penyusunan Pokok-Pokok pikiran DPRD	Rp 2,623,800.00	
		Rp 3,732,976,800	

Mamuju, 31 Januari 2024

KABAG PERSIDANGAN


PAHARUDDIN, BA

KASUBAG RAPAT DAN RISALAH


MEDALI INTAN, SE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN PERSIDANGAN
SUB BAGIAN KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRMAYANTI, AB, S.ip**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **PAHARUDDIN, BA**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,


PAHARUDDIN, BA

Pihak Pertama,


IRMAYANTI, AB, S.ip

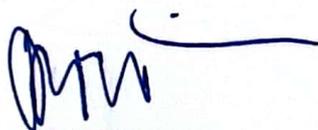
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN PERSIDANGAN
KEPALA SUB BAGIAN KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Program	28 Dokumen
	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Pembahasan	28 Dokumen
	Tersedianya Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-undang	28 Dokumen
	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik	28 Dokumen
	Terlaksananya Penyusunan Tata Tertib	Jumlah Tata Tertib	1 Dokumen
	Terlaksananya Orientasi DPRD	Jumlah Orientasi DPRD	1 Dokumen
	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Pendalaman Tugas DPRD	61 Dokumen
	Tersedianya Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli	6 Orang
	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik	Jumlah Pengawasan Kode Etik	1 Laporan
	Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Penyusunan Kode etik	1 Laporan
	Tersedianya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan Sumber daya Alam	1 Laporan
	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut BPK	1 Dokumen
	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan Pengguna Anggaran	1 Dokumen
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	1 Dokumen
	Tersedianya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Fasilitas Pansus	1 Dokumen

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	4,701,400	
	Pembahasan Rancangan Perda	9,597,800	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	626,000,000	
	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	1,590,000	
	Penyusunan Tata Tertib	2,998,400	
	Orientasi DPRD	290,350,200	
	Pendalaman Tugas DPRD	691,589,676	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	216,000,000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	144,000,000	
	Pengawasan Kode Etik	1,590,000	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	2,011,600	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15,360,000	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	15,015,000	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	15,015,000	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	2,000,400	
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	349,631,400	
		Rp 2,387,450,876	

Mamuju, 31 Januari 2024

KABAG PERSIDANGAN


PAHARUDDIN BA

KASUBAG KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN


IRMAYANTI, AB, SE

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN PERSIDANGAN
SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WARFAH, S.Ag**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **PAHARUDDIN, BA**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN**

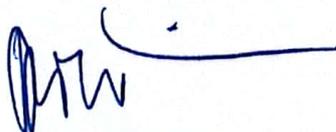
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,

Handwritten signature of PAHARUDDIN, BA in blue ink.

PAHARUDDIN, BA

Pihak Pertama,

Handwritten signature of WARFAH, S.Ag in blue ink.

WARFAH, S.Ag

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU
BAGIAN PERSIDANGAN
KEPALA SUB BAGIAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLERAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tersedianya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan terlaksana	12 Dokumen
	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	244 Laporan
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD	124 Dokumen
	Terlaksananya Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	150,220,700	
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	454,795,500	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1,488,945,500	
	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	286,836,000	
		Rp 2,380,797,700	

Mamuju, 31 Januari 2024

KABAG PERSIDANGAN


PAHARUDDIN, BA

KASUBAG KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLERAN


WARFAH, SE